



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

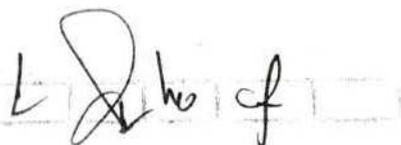
BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

L. Q. h. f.

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 ;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

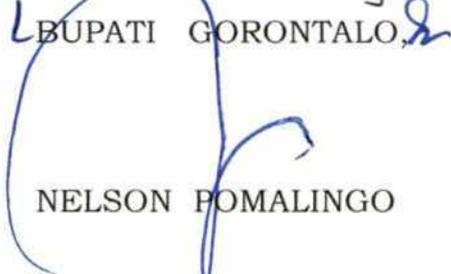
Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NO.	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5
1	Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan berkarakter	Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas	Angka Rata-Rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Terpenuhinya Layanan Kesehatan berkualitas	% pemenuhan indikator SPM Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah total persentase perolehan SPM}}{\text{Jumlah item SPM}}$	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.00$	Dinas Kesehatan
		Terbinanya tenaga kerja produktif	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terwadainya kreativitas dan inovasi masyarakat	Σ Produk inovasi daerah	Jumlah produk inovasi daerah	Badan penelitian dan Pengembangan
2	Memantapkan pemerintahan yang harmoni, bersih dan dinamis	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	Bappeda, Badan Keuangan

L 26 f

		Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}}{\text{Realisasi APBD Non PAD}} \times 100\%$	
		Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berintegritas	Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo	Hasil nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Bagian Ortala
3	Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian	Peningkatan Ekonomi Wilayah yang berkualitas	Incremental Capital Output Ratio	$\text{ICOR} = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$ <p>Dimana :</p> <p>ICOR = Nilai dari Incremental Capital Output Ratio</p> <p>ΔK = Penambahan Modal</p> <p>ΔY = Penambahan pengeluaran</p>	Badan Perencanaan

L s h f

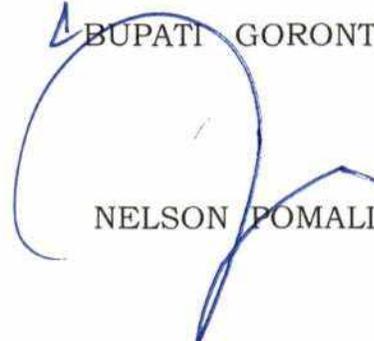
			PDRB per kapita AHB (Juta Rupiah)	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	Badan Perencanaan
			Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: P_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	Badan Perencanaan
		Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu	Σ Produksi Padi	Jumlah panen X produktivitas padi	Dinas Pertanian
			Σ Produksi Jagung	Jumlah panen X produktivitas jagung	Dinas Pertanian
			Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia	Jumlah populasi tahun n -- jumlah populasi tahun (n-1) dibagi jumlah populasi tahun (n-1) x 100%	Dinas Peternakan
			Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	Dinas Perikanan

1 2 h f

		Revitalisasi Jalan, jembatan dan sungai	% jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Ketersediaan sarana air bersih dan minum	% penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$	Dinas Lingkungan Hidup dan SDA
4	Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup	Penurunan angka kemiskinan	% penduduk di atas garis kemiskinan	100 – angka kemiskinan)	Dinas Sosial

L. L. L. f

		Penurunan tingkat kerentanan bencana	Indeks resiko bencana	Rata - rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitudo dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain - lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan	Badan Penanggulangan Bencana
5	Melakukan kerjasama global untuk pembangunan daerah	Telaksananya Kemiteraan antar daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen	Σ kerjasama kemeteriaan dan Non Departemen yang bekerja sama dan ditindak lanjuti	Mengukur jumlah kerjasama kementerian/non kementerian yang telah disepakati dan telah ditindaklanjuti	Bagian Kerjasama Global

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 - 2021

NAMA OPD

: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

TUGAS POKOK

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah

FUNGSI

: 1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah

2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan

3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terbangunnya sinergi antara eksekutif dan legislative dalam pembentukan regulasi	% Perda yang ditetapkan tepat waktu berdasarkan target prolegda	(Realisasi Perda yang ditetapkan tepat Waktu/Target Perda Propemperda) X 100%	Bagian Hukum
2	Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berintegritas	1) Nilai AKIP Kabupaten Gorontalo	Nilai Rata-rata AKIP OPD Kabupaten Gorontalo	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
		2) Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo	Nilai LPPD Kabupaten Gorontalo	Hasil Evaluasi Kemendagri

3	Tercapainya pelayanan publik yang berkualitas	1) Σ OPD yang melaksanakan Standar Prosedur Layanan	Σ OPD yang melaksanakan Standar Prosedur Layanan	Bagian Organisasi dan RB
		2) Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Seluruh OPD	Bagian Organisasi dan RB
4	Penerapan revolusi industri 4.0 dalam sistem Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	% OPD yang menerapkan Aplikasi dan Sistem Informasi dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan	(Jumlah OPD Kabupaten Gorontalo yang menggunakan eMonev/Jumlah Seluruh OPD Kabupaten Gorontalo) X 100%	Bagian Ekonomi dan Pembangunan
5	Telaksananya Kemiteraan antar daerah, dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen	1) Σ Lembaga Kementerian dan Non Departemen yang bekerja sama dan ditindaklanjuti	Σ Lembaga Kementerian dan Non Departemen yang bekerja sama dan ditindaklanjuti	Bagian Kerjasama Global
		2) Jumlah MOU/MOA yang ditindak lanjuti	Jumlah MOU/MOA yang ditindak lanjuti	Bagian Kerjasama Global

L d h f

NAMA SKPD

: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GORONTALO

TUGAS POKOK

: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

FUNGSI

- 1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan**
- 2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**
- 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD**
- 4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD**
- 5. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Lainnya sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kedinasan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terbangunya sinergitas antara eksekutif dan legislative dalam pembentukan regulasi	% Perda yang ditetapkan tepat waktu berdasarkan target prolegda	$\frac{\text{Jumlah Perda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Perda yang diusulkan}} \times 100$	BAGIAN LEGISLASI
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SEKRETARIAT DPRD

L 2 ho 2

- OPD** : INSPEKTORAT
MISI : Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis
TUGAS POKOK : Membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dibidang Pengawasan
FUNGSI : 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundang-undangan
 2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani
 3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat
 4. Sinegritas antar aparat pengawas sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan pengawasan interen

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentasi SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang bersih dari temun material}}{\text{Jumlah SKPD yg diperiksa}} \times 100$	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Persentasi Desa/Kelurahan yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	$\frac{\text{Jumlah Desa, Kel. yang bersih dari temun material}}{\text{Jumlah Desa, kel yg diperiksa}} \times 100$	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	Ditindak-lanjutnya Rekomendasi BPK dan APIP	Persentase rekomendasi audit BPK yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi audit BPK}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100$	Laporan Hasil Pemantauan
		Persentase rekomendasi audit APIP yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi audit APIP}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100$	Laporan Hasil Pemantauan

L & h o f

NAMA OPD

: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MISI

: KE.1 MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA CERDAS, SEHAT DAN BERKARAKTER

TUGAS POKOK

: Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI

- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD, dan Prestasi siswa sejak dini	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Paud
2	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar 7-15 tahun	Angka partisipasi kasar SD Angka partisipasi kasar SMP	$APK_{E,a}^t = \frac{E_h^t}{P_{E,a}^t} \times 100$ <p>Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E_h^t = adalah jumlah penduduk pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h $P_{E,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>	Bidang Dikdas

L S h f

3	Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan serta daya saing lulusan pendidikan dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$APM_{h,a,t}^t = \frac{E_{h,a,t}^t}{P_{h,a,t}^t} \times 100$ <p>Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun $E_{h,a,t}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t $P_{h,a,t}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a</p>	Bidang Dikdas
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya jumlah guru dan tenaga kependidikan pada satuan Paud dan pendidikan dasar	% PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERKUALIFIKASI S1 DAN TERSERTIFIKASI	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1 / D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	Bidang Mutu dan Tenaga Kependidikan
5	Meningkatnya upaya pengembangan nilai seni, sejarah, tradisi, dan pelestarian cagar budaya dan keurbakalan daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Bidang Kebudayaan

L R h f

NAMA OPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO

MISI : Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya layanan kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup - Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup - Persentase balita gizi buruk - % puskesmas terakreditasi 	<p>Jumlah kematian ibu</p> <p>Jumlah kematian bayi (0-12 bln) / Jumlah bayi lahir hidup X 1000</p> <p>Jumlah balita gizi buruk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah balita di wilayah dan pada kurun waktu yang sama X 100</p> <p>Jumlah kumulatif puskesmas yang memenuhi standar pelayanan</p>	<p>Bidang pelayanan kesehatan</p> <p>Bidang pelayanan kesehatan</p> <p>Bidang pelayanan kesehatan</p> <p>Bidang pelayanan kesehatan</p>

L. S. ho f

		<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi stunting pada anak di bawah 2 tahun - Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan 	<p>Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / jumlah seluruh bayi X 100</p> <p>Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / jumlah seluruh bayi X 100</p> <p>Jumlah pelayanan rujukan bagi masyarakat miskin ke fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Jumlah penduduk memperoleh jaminan kesehatan / Jumlah seluruh penduduk kabupaten X 100</p>	<p>Bidang pelayanan kesehatan</p> <p>Bidang pelayanan kesehatan</p> <p>Bidang pelayanan kesehatan</p> <p>Bidang pelayanan kesehatan</p>
--	--	--	---	---

L 2 k f

NAMA OPD
TUGAS POKOK
FUNGSI

: DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO
: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi tugas - tugas pembantuan
: 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas hidup Keluarga Miskin, Komunitas Adat dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.	Presentase Keluarga Miskin yang meningkat Kualitas Hidupnya	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif}}{\text{jumlah Keluarga Miskin yang ada}} \times 100$	Hasil Updeting Data PMKS dan BDT 2016
		Presentase Komunitas adat Terpencil (KAT) yang meningkat Kualitas Hidupnya	$\frac{\text{Jumlah Komunitas adat terpencil yang memperoleh Bantuan}}{\text{jumlah Komunitas adat terpencil yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial
		Presentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang Meningkatkan Kualitas Hidupnya	$\frac{\text{Jumlah Komunitas adat terpencil yang memperoleh Bantuan}}{\text{jumlah Komunitas adat terpencil yang ada}} \times 100$	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Ketersediaan Aksesibilitas Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS	Presentase Lanjut Usia Terlantar/Miskin yang terpenuhi sebagian Kebutuhan Dasarnya	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya}}{\text{jumlah Lansia terlantar yang ada}} \times 100$	Hasil Updeting Data PMKS dan BDT 2016

L. S. H. S.

		Presentase anak Terlantar terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Jumlah anak Terlantar terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya jumlah anak terlantar yang ada yang ada	X 100	Hasil Updeting Data PMKS dan BDT 2016
		Presentase Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam/Sosial	Jumlah Korban Bencana yang tertangani jumlah Korban Bencana yang ada	X 100	Hasil Updeting Data PMKS dan BDT 2016
		Presentase Penyandang Cacat yang mendapat Asistensi Bantuan Sosial	jumlah Penyandang cacat yang mendapat bantuan Jumlah Penyandang cacat yang ada	X 100	Hasil Updeting Data PMKS dan BDT 2016
		Presentase Eks Penyandang Penyakit sosial (Pengemis, WTS, Waria, Pengguna Narkoba, narapidana) yang diberikan Bimbingan Motivasi dan Keterampilan	jumlah PMKS yang tertangani melalui Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial jumlah PMKS yang ada	X 100	Hasil Updeting Data PMKS dan BDT 2016
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan sarana dan prasarana Lembaga /Organisasi Sosial	Jumlah lembaga/Orsos pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat bantuan sarana dan prasarana Jumlah lembaga /Orsos yang ada	X 100	Dinas sosial Kab. Gorontalo
		Jumlah lembaga/Orsos yang aktif melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial/kemasyarakatan	Jumlah Orsos yang aktif Jumlah lembaga /Orsos yang ada	X 100	Dinas sosial Kab. Gorontalo
4	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan SKPD	Presentase Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Anggaran yang tersedia Jumlah Realisasi Anggaran	X 100	Dinas sosial Kab. Gorontalo
		Presentase alokasi anggaran Penanganan PMKS	Jumlah Anggaran Penanganan PMKS Jumlah Anggaran yang tersedia	X 100	Dinas sosial Kab. Gorontalo

L a h f

Nama OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

Misi : Misi 3 : Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 4. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	Sumber Data
1	Revitalisasi Jalan, jembatan dan sungai	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100$	Laporan Bulanan Bidang Bina Marga
		Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah Seluruhnya}} \times 100$	Laporan Bulanan Bidang Bina Marga
		Persentase sungai kewenangan kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing	$\frac{\text{Panjang Sungai Kewenangan Kabupaten yang dinormalisasi dan penguatan tebing}}{\text{Panjang Sungai Kewenangan Kabupaten}} \times 100$	Laporan Bulanan Bidang PSDA
		Persentase Irigasi kewenangan Kabupaten yang terbangun dan dipelihara	$\frac{\text{Panjang jaringan Irigasi yang tertangani}}{\text{Panjang jaringan Irigasi Kewenangan kabupaten}} \times 100$	
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$	Laporan Bulanan Bidang PSDA

L & hu f

2	Ketersediaan sarana air bersih dan minum	Persentase penduduk berakses air minum	Penduduk berakses air minum Jumlah penduduk	x 100	Laporan Bulanan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
3	Ketercapaian perumahan dan sanitasi yang layak	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal	x 100	Laporan Bulanan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
4	Ketersediaan Bangunan dan Gedung Representatif	Jumlah Bangunan pemerintah yang representative	Jumlah Bangunan Pemerintah yang terbangun dan terpelihara		Laporan Bulanan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW Rencana Peruntukan	x 100	Laporan Bulanan Bidang Tata Ruang

L d h f

NAMA OPD

: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN GORONTALO

TUGAS

: Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dibidang Perumahan dan Permukiman, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

FUNGSI

: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Rekomendasi Teknis dibidang

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perumahan / Permukiman yang layak bagi MBR	Rasio Rumah layak Huni	$\frac{\text{Jlh Rumah layak Huni}}{\text{Jlh Penduduk di Kb. Gtlo}} \times 100\%$	- Data Base Terpadu Dinas Perkim
	Cakupan Layanan Rumah layak Huni yang Terjangkau		$\frac{\text{Jlh Rumah Tangga MBR yang menempati RLH}}{\text{Jlh Rumah Tangga MBR}} \times 100\%$	- SK Bupati tentang Kawasan Kumuh
	Prosentase Lingkungan Pemukiman Kumuh		$\frac{\text{Jlh Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh}}{\text{Jlh Luas Wilayah Kab. Gorontalo}} \times 100\%$	- Data Base Terpadu Dinas Perkim
	Cakupan luas lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		$\frac{\text{Jlh Luas Lingkungan Yg Sehat}}{\text{Jlh Luas Pemukiman}} \times 100\%$	- SK Bupati tentang Kawasan Kumuh
	Cakupan layanan masalah Tanah Pemda di Kabupaten Gorontalo		$\frac{\text{Jlh Masalah Tanah Pemda di Kab. Gtlo yg tertangani}}{\text{Jlh Seluruh Masalah Tanah Pemda di Kab. Gorontalo}} \times 100\%$	Data Bidang PSU
				Data Bidang Pertanahan

L. S. H. f

NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GORONTALO

TUGAS POKOK : TEGAKNYA PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH :SERTA TERJAGANYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN MEMBERI PERLINDUNGAN PADA MASYARAKAT

- FUNGSI
- 1 PENYUSUNAN
 - 2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 - 3 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI DAERAH
 - 4 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 - 5 PELAKSANAAN
 - 6 PENGAWASAN
 - 7 PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Presentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan}} \times 100 \%$ <p>Pembilang : Jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan Penyebut : Jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan Satuan Indikator : Persentase (%) Contoh Perhitungan : Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pantauan</p> $\frac{50}{100} \times 100\% = 50\%$	RPJMD/RENSTRA

L. S. W. f

2	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat terhadap semua peraturan Daerah	Jumlah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda}}{\text{Jumlah Target Penindakan pelanggaran Perda}} \times 100\%$ <p>Pembilang : jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan</p> <p>Penyebut : jumlah pelanggaran perda yang dilakukan penindakan di tahun bersangkutan</p> <p>Satuan Indikator : Persentase (%)</p> <p>Contoh Perhitungan : Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pantauan dari satuan polisi pamong praja di Kabupaten/Kota Y pada Tahun X terdapat 100 (seratus) pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah, namun atas pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tersebut, baru dapat diselesaikan sebanyak 50 kasus maka efektivitas dari pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun X dapat dilihat sebagai berikut :</p> $\frac{25}{50} \times 100\% = 50\%$	RPJMD/RENSTRA
---	--	--	--	---------------

L 2 h 3

- NAMA OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO
- MISI : Mewujudkan Pembangunan berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- TUGAS POKOK : Membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- FUNGSI : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2 Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pengelolaan Informasi Administrasi
 3 Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Umum dan Pelayanan Kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
 4 Pengolahan Data dan Informasi serta Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 5 Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas Fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak <17 Tahun}} \times 100$	Laporan Kependudukan dari Kecamatan
		Tingkat Penerbitan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia >17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun atau telah menikah}} \times 100$	Laporan Kependudukan dari Kecamatan
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Bayi berakta Kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100$	Laporan Kependudukan dari Kecamatan

L r w f

NAMA OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabup. Gorontalo

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

- FUNGSI
- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan Perlindungan sumber daya alam dan ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan Perlindungan sumber daya alam dan ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian dan persinkronisasian pelaksanaan kebijakan Amdal, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan Perlindungan sumber daya alam dan ekosistem, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan SDM di bidang lingkungan hidup dan SDA;
 - g. pemberian dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup dan SDA;
 - h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan SDA;
 - i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan SDA;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan SDA; dan
 - k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kualitas baku lingkungan hidup	1 Cakupan wilayah penanganan sampah	Jumlah wilayah kecamatan yang ditangani / jumlah kecamatan keseluruhan x 100%	RPJMD/RENSTRA
		2 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau / Luas wilayah ber-HPL/HGB	RPJMD/RENSTRA

L 2/10

NAMA OPD
TUGAS POKOK

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GORONTALO
: Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan serta melaksanakan tugas-tugas dan tugas pembantuan,

FUNGSI

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan produksi dan pemasaran produk IKM	Σ Penambahan Unit Usaha Industri	$\Sigma \text{ Penambahan Unit Usaha Industri} = N - N_0$ <p>N = Jumlah Unit Usaha Tahun Berjalan N_0 = Jumlah Unit Usaha Tahun Sebelumnya</p>	1. Data IKM
2	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Barang Dan Jasa Serta Melaksanakan Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan	% Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	$\frac{\text{Jumlah Pasar yang memenuhi Standar}}{\text{Jumlah Pasar}} \times 100 \%$ $\frac{2}{41} \times 100 \%$ <p>4.9 %</p>	1. Data Jumlah Pasar

Handwritten signature

NAMA OPD : DINAS PERTANIAN KABUPATEN GORONTALO

TUGAS POKOK : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dibidang Pertanian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

FUNGSI : Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Pemberian Perijinan dan Pembinaan Terhadap Unit Pelaksanaan Umum, Pelaksanaan Teknis Dinas dan Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tercapainya Peningkatan Produksi Tanaman Padi, Palawija, sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Produksi Padi- Jumlah Produksi Padi- Jumlah Produksi Jagung- Jumlah Produktifitas Jagung- Jumlah Produksi Perkebunan- Jumlah Produktifitas Perkebunan- Jumlah Produktifitas Hortikultura	<ul style="list-style-type: none">Luas Panen x PorduktifitasHasil UbinanLuas Panen x PorduktifitasHasil UbinanLuas Panen x PorduktifitasHasil UbinanHasil Ubinan	<ul style="list-style-type: none">Laporan Statistik PertanianLaporan Ubinan PenyuluhLaporan Ubinan BPS
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan	<ul style="list-style-type: none">- Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun- Jumlah dan Jenis sumber-sumber air irigasi pertanian yang dibangun- Jumlah Sarana Produksi yang diadakan	<ul style="list-style-type: none">Luas Panen x PorduktifitasLuas Panen x PorduktifitasLuas Panen x Porduktifitas	<ul style="list-style-type: none">Hasil Monev dan Laporan Petugas Lapangan

L D k f

OPD
MISI
TUGAS POKOK

FUNGSI

- : DINAS KETAHANAN PANGAN
 : " Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian "
 : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi Dibidang Pengkajian, Perumusan, Pengembangan, Koordinasi Pemantauan Ketahanan Pangan
 : a. Mengkaji dan Menetapkan Kebijakan Teknis Ketahanan Pangan Sesuai Kebijakan Umum
 b. Menetapkan Program Kerja dan Rencana Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan Serta Pemantauan Pengelola Cadangan Pangan
 c. Menyelenggarakan Pengendalian dan Perumusan Kebijakan Harga Komoditas Pangan Strategis
 d. Menyelenggarakan Koordinasi Stabilisasi/ Perindustrian Pangan Terutama Komoditas Pangan Strategis
 e. Mengkaji dan Mengembangkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 f. Menyelenggarakan Pembinaan Gerakan Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Utama - Jumlah Energi - Jumlah Protein	Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) = $\frac{\text{ketersediaan pangan /kap/hari} \times \text{kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$ Ketersediaan Protein (Gram / Kap/Hari) $\frac{\text{ketersediaan pangan /kap/hari} \times \text{kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$	- Bagian Ekonomi - Dinas Kesehatan - BPS - Puskesmas - Dinas Pertanian - Bapecapil
2	Mengembangkan Sistem Distribusi	1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	1). Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (Ton) Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten (Permentan 65 tahun 2010 tentang SPM)	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
3	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman bagi setiap anggota Keluarga	Skor PPH	Skor PPH adalah Energi masing-masing komoditas dibagi angka Kecukupan Gizi x 100 % Skor PPH merupakan komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam bergizi seimbang dan aman	Survey di Lapangan 21 Desa di 7 Kecamatan Kab. Gorontalo

Handwritten signature

OPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 MISI : Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian
 TUGAS POKOK : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan
 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
 4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
 FUNGSI : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi peternakan	Persentase pertumbuhan populasi ternak ruminansia	4%	$\frac{\text{Jumlah ternak ruminansia tahun } n - \text{Jumlah ternak ruminansia tahun } (n-1)}{\text{Jumlah ternak ruminansia tahun } (n-1)}$	Bidang Perbibitan dan Saprass
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Persentase Peningkatan Kemitraan Jaringan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	60%	$\frac{\text{Jumlah Kenaikan Jaringan Plasma Inti} \times 100 \%}{\text{Jumlah Seluruh Plasma Inti}}$	Bidang P2HP
		Persentase pemeliharaan kesehatan hewan	100%	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan} \times 100\%}{\text{Jumlah Permintaan Pelayanan}}$	Bidang Keswan

L. R. H. F.

Nama OPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Misi : Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas - tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata;
2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata;
3 Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata;
4 Pelaksanaan tugas - tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terciptanya Jiwa Kewirausahaan Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$	LAPORAN TAHUNAN
2	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yg aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pemusatan Latihan bagi Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet berprestasi	Jumlah Atlet yg memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam satu tahun	
4	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	

Data kunjungan OW :
1 Pentadio Resort
2 Pakaya Tower
3 Taluhu Barakati
4 Bandayo Poboide

L D W f

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. perumusan kebijakan pengelolaan kerjasama desa, perencanaan dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
3. perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
4. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan desa untuk pengentasan kemiskinan;
5. Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
6. perpembinaan Perangkat Desa, kelembagaan, dan tata kelola administrasi penyelenggaraan urusan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan administrasi
7. pendapatan keuangan dan aset kekayaan Desa;
8. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
9. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI /RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat}}{\text{Total pasca program pemberdayaan masyarakat}} \times 100$	Renstra
			$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK aktif}} \times 100$	Renstra
2	Meningkatnya kinerja dan peran serta Kelembagaan Desa	Persentase PKK Aktif	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa}} \times 100$	Renstra
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		

L. D. b. f

Nama OPD
Tugas Pokok
Fungsi

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
: Melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pe
: a. Perumasan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase pemustaka pertahun	Jumlah pemustaka	Laporan berkala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan
			$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-59 Th Kab. Gorontalo}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-59 Th Kab. Gorontalo}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku/bahan pustaka	Akumulasi Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Laporan berkala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	Laporan berkala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	

L. S. S.

- OPD** : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GORONTALO
MISI : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup
TUGAS POKOK : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
FUNGSI
 - 1 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumn sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya;
 - 4 Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Mengendalikan Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	$5 \times (\text{ASFR (15-19 Thn)} + \text{(20-24 Thn)} + \text{(25-29 Thn)} + \text{(30-34 Thn)} + \text{(35-40 Thn)} + \text{(41-45 Thn)} + \text{(46-49 Thn)}) \text{ dibagi } 1.000$	DPPKB
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	$\frac{\sum \text{ Pasangan Usia Subur (PUS) yang TIAL dan IAD}}{\text{ Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$	DPPKB
		Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran	$\frac{\sum \text{ Perempuan usia 15-19 tahun yang melahirkan}}{\text{ Perempuan usia 15-19 tahun}} \times 100$	DPPKB

L. S. P.

NAMA OPD : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO**

TUGAS POKOK : membantu kepala Daerah dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta

FUNGSI

- : 1 Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika
- 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informatika
- 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Bidang Komunikasi dan Informatika
- 4 Pelaksanaan fungsi-fungsi Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

NO	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis	Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi	Jumlah OPD yang Menerapkan Aplikasi dan Sistim Informasi Dalam Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan Aplikasi dan Sistim Informasi Dalam Pelayanan}}{\text{Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah}} \times 100$	Renstra
			Jumlah Penguatan kapasitas media layanan informasi	$\frac{\text{Jumlah Penguatan kapasitas media layanan informasi}}{\text{Jumlah Media Layanan Informasi}} \times 100$	Renstra
			Dokumen data/informasi statistik yang tersedia	$\frac{\text{Jumlah dokumen/informasi statistik yang tersedia}}{\text{Jumlah dokumen/informasi statistik}} \times 100$	Renstra
2	Terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang profesional dan berkinerja tinggi	Terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang profesional dan berkinerja tinggi	Nilai Hasil Evaluasi LKIP	$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi LKIP}}{\text{LKIP}} \times 100$	Renstra
			Tingkat penyerapan anggaran	$\frac{\text{Tingkat penyerapan anggaran}}{\text{Penyerapan anggaran}} \times 100$	
			Persentase temuan inspektorat/BPK	$\frac{\text{Persentase temuan inspektorat/BPK}}{\text{Temuan inspektorat/BPK}} \times 100$	

L. R. S.

NAMA OPD

: DINAS KOPERASI

TUGAS POKOK

: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

FUNGSI

:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
- 4. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)		SUMBER DATA
1	Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$	X 100%	PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017
2	Berkembangnya usaha dan tumbuhnya jaringan usaha koperasi dan UMKM	Persentase Wirausaha Baru	$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha}}$	X 100%	SK. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gorontalo
3	Kuatnya struktur permodalan koperasi dan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}}$	X 100%	PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017
4	Terkendalinya pemanfaatan modal pinjaman koperasi dan UMKM yang tepat sasaran				

L. D. h. f

NAMA OPD
TUGAS
FUNGSI

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo
: Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
: 1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
2. Pemberian Izin dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas
4. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	Penanggung jawab
1	Terbentuknya tenaga kerja yang Berprestasi kerja tinggi dan mandiri serta perlindungan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	\sum Tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan	Data Pelatihan	Eselon II, III dan IV
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	\sum Tenaga Kerja yang mendaftar	Laporan IPK	Eselon II, III dan IV
			$\frac{\sum \text{Tenaga Kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Tenaga Kerja yang mendaftar}} \times 100$		
% penanganan kasus ketenagakerjaan di perusahaan	$\frac{\sum \text{Kasus terselesaikan}}{\sum \text{kasus}} \times 100$	Data HI	Eselon II, III dan IV		
2	Terciptanya permukiman transmigrasi yang mandiri	Luasan Permukiman Transmigrasi yang tersedia Jumlah UPT Bina	Luas lahan untuk permukiman Transmigrasi UPT yang di Bina	Data Ketransmigrasian dan Data UPT	Eselon II, III dan IV

L. S. W. F.

Nama OPD

Tugas

Fungsi

: Dinas Perhubungan

: Membantu tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

- : - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan ;
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas ;
- Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Fasilitas LLAJ dan Terminal/Pelabuhan	Persentase kendaraan yang telah melaksanakan uji berkala di BPKB	Σ kendaraan telah diuji / Σ kendaraan wajib Uji x 100%	Renstra
		Persentase peningkatan penumpang di terminal/Pelabuhan	Σ Penumpang yang terangkut / Σ Kapasitas Tempat Duduk x 100%	Renstra
	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Σ Prasarana dan fasilitas yang ada / Σ Prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan x 100%	Renstra
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Penumpang Umum dan Khusus	Persentase Peningkatan Moda Angkutan Umum dan Khusus pada Jaringan Jalan Kabupaten	Σ Moda Angkutan yang melayani / Σ Jaringan Jalan Kab. Yang membutuhkan X 100%	Renstra
	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase Peningkatan Kuantitas Rambu/Fasilitas Keselamatan Jalan di Kabupaten Penurunan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas akibat kurangnya rambu/Faskes.	Σ Kuantitas Rambu/Faskes yang tersedia / Σ Ruas Jalan Kabupaten X 100 % Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas	Renstra

Handwritten signature

- NAMA SKPD** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GORONTALO
TUGAS POKOK : Membantu Tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal
FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
: 2. Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
: 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
: 4. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal dan Perizinan;
: 5. Pengoordinasian pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
: 6. Pemantauan dan Pengevaluasian proses pemberian Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
: 7. Pelaksanaan Promosi, Kerjasama dan Penanaman Modal;
: 8. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal serta menerima Pengaduan dan Advokasi yang berkaitan dengan Penanaman Modal

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI /RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	3	4	5	6
1	Tercapainya Pelayanan Publik yang berkualitas	1 Presentase Jenis Layanan Perizinan	$\frac{\text{Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani}}{\text{Jumlah seluruh Jenis Perizinan}} \times 100$	1 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan 2 Rekapitulasi jumlah jenis perizinan yang diterbitkan selama Tahun n
		2 Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan Tahun n}}{\text{Jumlah Target Dokumen Perizinan yang akan diterbitkan Tahun n}} \times 100$	Rekapitulasi jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan selama Tahun n
2	Optimalnya Promosi Potensi Daerah	1 Prosentase Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Nilai Investasi Tahun } ^n - \text{Nilai Investasi Tahun } ^{n-1}}{\text{Nilai Investasi Tahun } ^{n-1}} \times 100$	1 Data Nilai Investasi Tahun sebelumnya (Tahun n-1) 2 Data Nilai Investasi Tahun Evaluasi (Tahun n)
		2 Jumlah Investor berskala Nasional	Rekapitulasi nilai investasi PMA/PMDN dari semua sektor	Data aset Investor PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Gorontalo
3	Optimalnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang membuat LKPM sesuai perundang-undangan	Rekapitulasi Perusahaan yang membuat LKPM	Data aset Investor PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Gorontalo

L. J. W. f

1. Perangkat Daerah
2. Tugas Pokok
3. Fungsi

: Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas

:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu	1) Nilai Tukar Nelayan	Indeks	Indeks yang diterima nelayan X 100 <i>Dibagi</i> Indeks yang dibayar nelayan	Data BPS
		2) Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan PEMDA Tahun n X 100 <i>Dibagi</i> Jumlah kelompok nelayan	Laporan Tahunan Dinas Perikanan
		3) Produksi perikanan	Persen	Jumlah Produksi Ikan (Ton) X 100 <i>Dibagi</i> Target Daerah (Ton)	
		4) Konsumsi Ikan	Persen	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) X 100 <i>Dibagi</i> Target Daerah (Kg)	

L. D. h. f

- OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
- MISI : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
- TUGAS POKOK : Anak
- FUNGSI :
 1 Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program evaluasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2 Pengelolaan sumber daya aparatur, prasarana dan sarana
 3 Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 4 Penyelenggaraan kerjasama instansi pemerintah, swasta, LSM dan organisasi lembaga masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
 5
 6 Pelaksanaan pengelolaan data evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Pengarustamaan gender dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (%)	Indeks Perempuan yang bekerja diberbagai setor Dikali 100 Dibagi Jumlah Tenaga Kerja Laki-laki	Bidang PUG
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dibagi dengan Jumlah Tenaga Kerja Perempuan	
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Jumlah Perempuan yang bekerja di lembaga Swasta dibagi dengan Jumlah Tenaga Kerja Perempuan	

L. Q. h. f.

		Rasio KDRT	Rasio KDRT Terhadap Jumlah RT	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dibagi jumlah kekerasan perempuan dan anak kali 100	Bidang PPA
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah penegakan hukum terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak dibagi jumlah kekerasan perempuan dan anak kali 100	
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak yang mendapatkan bantuan hukum dibagi jumlah kekerasan	

L. S. W. P.

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO

TUGAS POKOK : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah
 3. Pelaksanaan Pelayanan Umum
 4. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Penetapan APBD	Batas waktu penetapan APBD	Renstra Badan Keuangan
2		Laporan keuangan daerah yang tepat waktu	Batas akhir pemasukan laporan keuangan daerah	
3		Pertumbuhan PAD	$\frac{PAD \text{ tahun } (n) - PAD \text{ tahun } (n - 1)}{PAD \text{ tahun ke } (n-1)} \times 100$	

[Handwritten signature]

- Nama OPD : **BADAN PERENCANAAN**
Misi 2 : **Memantapkan pemerintahan yang harmoni, bersih dan dinamis**
Tugas Pokok : **Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan perencanaan,**
Fungsi : **1 Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan**
2 Penyusunan rencana pembangunan daerah dan pendanaan / penganggarannya, baik jangka panjang, menengah dan tahunan, per bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang, harmonisasi maupun sinkronisasi antar tingkat/fungsi pemerintahan
3 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4 Pengevaluasian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan
5 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
6 Pengoordinasian dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah
7 Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan
8 Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan
9 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi (Rumus Perhitungan)	Sumber Data
	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100$	Renstra Badan Perencanaan
			Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100$	Renstra Badan Perencanaan
		Terwujudnya Aparatur Perencana yang berkualitas dan Kompetitif	Jumlah Aparatur Perencana yang mengikuti Diklat Perencana	Jumlah Aparat Perencana yang mengikuti Diklat Perencana	Renstra Badan Perencanaan

L. D. S. f

Nama OPD	: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tugas Pokok	: Mengelola administrasi kesekretariatan kepegawaian, fasilitasi profesi dan informasi aparatur, mutasi dan kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi aparatur, penilaian kinerja serta pembinaan aparatur, serta melaksanakan tugas - tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan aparatur sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan 3. Pemfasilitasian dukungan teknis operasional dan administrasi pada organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten 4. Pengolahan data dan informasi serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 5. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier aparatur 6. Penetapan pensiun aparatur sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan 7. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 8. Pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi aparatur 9. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur 10. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur 11. Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada aparatur 12. Pelaksanaan pelayanan umum 13. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Badan 14. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan 15. Pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsinya

L 26 f

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI (RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA
	Terbentuknya zona satelit pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan - Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal - Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural - Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah - Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah - Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah - Rasio ASN berpendidikan S2 dan S3 	<p>Jumlah hari rata - rata lama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan</p> <p>Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dibagi dengan jumlah total ASN dikali 100</p> <p>Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dibagi dengan jumlah total jabatan di kali 100</p> <p>Jumlah jabatan pinn tinggi yang ada pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo</p> <p>Jumlah jabatan administrasi yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo</p> <p>Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang ada pada instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo</p> <p>- Jumlah ASN yang berpendidikan S2 dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100</p> <p>- Jumlah ASN yang berpendidikan S3 dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100</p>	<p>Dokumen RPJMD/BKD</p>
	Meningkatnya kompetensi aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditempatkan melalui job bidding - Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin 	<p>Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditempatkan melalui job bidding dibagi dengan jumlah total JPT dikali 100</p> <p>Jumlah ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin dibagi dengan jumlah total ASN dikali 100</p>	<p>Dokumen RPJMD/BKD</p> <p>Dokumen RPJMD/BKD</p>

L. S. H. S.

- NAMA OPD** : **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
- TUGAS POKOK** : **Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan**
- FUNGSI** :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan penelitian dan pengembangan
 2. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengembangan dan Pemelitan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan
 4. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan
 5. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan bidang Inovasi dan Teknologi
 6. Penyelenggaraan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD dibagi dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD x 100	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah x 100	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan jumlah total perangkat daerah x 100	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG
		Σ Riset dan evaluasi pengembangan potensi daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan	Mengukur jumlah riset dan evaluasi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG
		Σ Hasil riset kewilayahan dan kependudukan yang digunakan	Mengukur hasil riset kewilayahan dan kependudukan yang digunakan	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG
		Σ Hasil riset politik dan pemerintahan yang digunakan	Mengukur hasil riset politik dan pemerintahan yang digunakan	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG
2.	Penguatan peran aktor dan kelembagaan Quadro Helix (Academic, Bussiness, Civil Society, Government)	Σ Produk Inovasi Daerah	Mengukur jumlah produk yang merupakan inovasi daerah yang telah dihasilkan dan dapat dimanfaatkan oleh instansi teknis dan masyarakat	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG
		Σ Produk Kreativitas Daerah	Mengukur jumlah produk teknologi terapan yang telah dihasilkan dan diterapkan/dimanfaatkan oleh instansi terkait dan masyarakat	LAKIP, LAPORAN TAHUNAN BALITBANG

L. Q. W. P.

NAMA PERANGKAT DAERAH :
 TUGAS POKOK :
 FUNGSI :

- : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**
: Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanganan bencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan pangan;
 - penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - pelaksanaan penyelenggaraan penggulungan bencana pada wilayahnya;
 - pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah stiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Menurunnya Indeks Resiko Bencana (IRB)	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai SPM	Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100 \%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapatkan akses sarpras pencegahan dan kesiapsiagaan}}{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang selamat dan dievakuasi}}{\text{Jumlah korban terdampak bencana}} \times 100 \%$	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	$\frac{\text{Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	UPT Damkar
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100 \%$	UPT Damkar

L S W f

- OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO
- MISI : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis
- TUGAS POKOK : Membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- FUNGSI :
- 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2 Pelaksanaan Dukungan Teknis Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya
 - 3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dukungan Teknis Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya
 - 4 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya
 - 5 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Badan dan,
 - 6 Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas Fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan	Tingkat Keberhasilan Pencapaian Zero Growth Terkait Konflik Berlatar Belakang SARA	Tidak ada pertumbuhan konflik berlatar belakang etnis dan agama dalam setahun	Bidang I
2	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Stabilitas dan Konflik	Persentase Permasalahan Stabilitas dan Konflik yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah permasalahan konflik yang tertangani}}{\text{Permasalahan Konflik yang Terjadi dalam setahun}} \times 100$	Bidang IV
3	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan di Kabupaten Gorontalo	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah Ormas yang terdaftar (aktif)}} \times 100$	Bidang III
4	Meningkatnya Pembinaan Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik yang di Arahkan pada Wilayah dengan Tingkat Partisipasi Politik dibawah 70 %	$\frac{\text{Pendidikan politik yang terlaksana pada wilayah dengan tingkat partisipasi dibawah 70\%}}{\text{Seluruh wilayah se Kabupaten Gorontalo}} \times 100$	Bidang II

E S W f

OPD : RSUD DR. M.M Dunda Limboto

MISI : Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Senat dan Berkarakter

Tugas : 1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara maksimal, serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

2. Melaksanakan pelayanan umum yang bermutu sesuai standar pelayanan kerumahsakit.

Fungsi : 1. Menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan

2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya Rumah Sakit yang Bermutu, Sehat dan Terjangkau (BeST)	Terselenggaranya produk layanan berbasis standar mutu, berorientasi pada kepuasan pasien dan meningkatnya pendapatan rumah sakit	% Pemanfaatan tempat tidur / Bed Occupancy Ratio (BOR)	Jlh hari perawatan/(jlh tempat tidur x jlh hari dalam satu periode) x 100	
			Rata-rata lama waktu pasien dirawat / Average Length of Stay (ALOS)	Jlh lama dirawat / jlh pasien keluar (mati+hidup)	
			Rata-rata lama waktu dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	Jlh tempat tidur x periode - hari perawatan / jlh pasien keluar (mati+hidup)	
			Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, yakni berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu / Bed Turn Over (BTO)	Jlh pasien dirawat (hidup+mati) / jlh tempat tidur	
			Angka kematian > 48 jam setelah dirawat dalam seribu pasien keluar / Net Deth Rate (NDR)	Jumlah pasien mati > 48 jam / Jlh pasien keluar (hidup+mati) x 1.000	
			Angka kematian umum dalam seribu pasien keluar / Gross Deth Rate (GDR)	Jumlah pasien mati seluruhnya / Jlh pasien keluar (hidup+mati) x 1.000	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pasien menyatakan puas / Jumlah total pasien (data survei) X 100	
			Angka komplain	Jumlah pasien komplain / Jumlah total pasien komplain terlayani X 100	
			Indeks kepuasan karyawan	Jumlah karyawan menyatakan puas / Jumlah total karyawan (data survei) X 100	
Sales Growth Rate (SGR)	Selisih pendapatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya / Jumlah pendapatan tahun sebelumnya X 100				

C. S. H. P.

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT LIMBOTO
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, **Ketatausahaan Dan Rumah Tangga**
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan **Tugas dan Fungsinya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		11
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

Handwritten signature

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT TELAGA

TUGAS POKOK : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupate

FUNGSI : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
6. Pembinaan Pelayanan Umum
7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L S W P

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT BATUDAA
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		11
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. D. W. f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT TIBAWA
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		11
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. S. W. P.

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT BATUDAA PANTAI
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		11
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{w}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. Q. W. S.

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT BOLIYOHUTO
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas		Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang = IKM	

L 2 k f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT BILATO
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. S. W. P.

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT TELAGA BIRU
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas		Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang = IKM	

L. S. f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT BONGOMEME
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, **Ketatausahaan** Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. D. W. F.

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT TOLANGOHULA
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas		Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang = IKM	

L D W S

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT MOOTILANGO
TUGAS POKOK : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
FUNGSI : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas		Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang = IKM	

L. D. W. f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT PULUBALA
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L Q w s

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT LIMBOTO BARAT
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L S h f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT TILANGO
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. S. f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT TABONGO
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas		Total Unsur Yang Terisi	

L R b f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT BILUHU
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas		Total Unsur Yang Terisi	

L D h f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT ASPARAGA
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. L. W. F

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT TALAGA JAYA
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

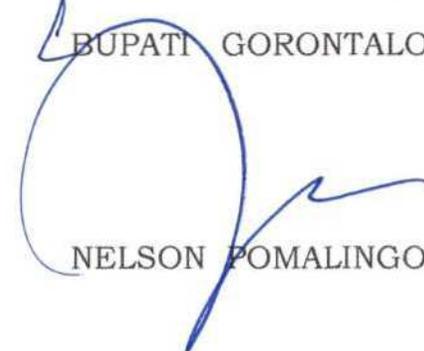
NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

L. S. W. f

- NAMA SKPD** : KANTOR CAMAT DUNGALIYO
- TUGAS POKOK** : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Kelurahan Serta Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Kabupaten.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan dan Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri
 2. Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
 3. Pembinaan Pembangunan Yang Meliputi Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Perekonomian, Produksi Dan Distribusi
 4. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Wilayah dan Lingkungan Hidup
 6. Pembinaan Pelayanan Umum
 7. Penyusunan Rencana dan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan Dan Rumah Tangga
 8. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} = \text{IKM}$	Hasil IKM
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas			

BUPATI GORONTALO, 


 NELSON POMALINGO